

**PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)

Muhammad Firas Abdulhadi

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email : Muh.firasabdulhadi@gmail.com

Abstract

The research is to examine the influence of the understanding of local financial accounting system, capacity of human resource and the utility of information technology toward the quality of financial report information of yogyakarta government. The used data for the research is primer data. It is the result from questionnaires spreading. The respondence of this research is manager of financial report of yogyakarta local government. The questionnair is spread to 90 respondents, meanwhile that can be proccesd are 63 questionnaires. The method od sample taking is using purposive sampling. Analytic technique of data in this research is using double linier regretion technique.

The result of regretion test shows that the local government financial accounting system understanding and the capacity od human resource are not influenced significantly to the quality of local government financial report information, meanwhile the utility of technology is influenced positively to the quality of local government financial report information.

keyword: the understanding of local financial accounting system, capacity of human resource, the utility of information technology and quality of of local government financial report information.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah selaku tokoh utama dalam penyajian laporan keuangan yang akan dipublikasi ke masyarakat harus bersifat terbuka dan memiliki kebenaran yang valid sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahaminya. Oleh karena itu diperlukan suatu pelaporan yang bersifat akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka memuaskan kebutuhan para pengguna laporan keuangan dan dapat menciptakan otonomi daerah yang akurat (Darmawan, 2014).

Menurut Pemandagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan, (Darmawan 2014).

Baridwan (2004) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Sedangkan menurut Bastian (2011: 194) terdapat lima jenis pendapat yang diberikan oleh auditor (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY pada tahun 2015 mendapat pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk hasil pemeriksaan LKPD dari Tahun Anggaran 2015-2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<http://www.bpk.go.id>).

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah belum semua memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (Indriasari dan Ertambang, 2008). Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang tersedia di pemerintah daerah belum sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai. Penempatan sumber daya manusia dibeberapa sub bagian dan/atau bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan. Akibat dari keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, tanggungjawab dari para pengelola keuangan menjadi lebih berat untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang akuntansi akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidakseragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Roshanti dkk, 2014).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, (Pradono, 2010)

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu kemampuan seseorang staf/pegawai untuk menyusun suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur aset tetap/ barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas (Winanti, 2014).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3). Menurut Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kualitas Informasi

Huang, *et al.*(1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas: kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi, kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan, kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

H1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi yang memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian akuntansi yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Penelitian Indriasih dan Poppy (2014) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah memiliki efek pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap keterandalan laporan keuangan, semakin kualitas sumber daya manusia terampil dan mempunyai keahlian dibidang akuntansi, semakin baik andal laporan keuangan yang dihasilkan.

Upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur ini masih belum dapat dikelola dengan baik. Hal itu ditunjukkan antara lain oleh masih sulitnya mengubah cara pikir (*mindset*) dan cara kerja aparatur, masih rendahnya disiplin dan etika pegawai, sistem karier yang belum sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja, sistem remunerasi yang belum memadai untuk hidup layak, rekrutmen yang belum dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja, lemahnya pengawasan dan audit terhadap kinerja aparatur, dan sistem informasi manajemen kepegawaian yang belum berfungsi secara optimal (Bappenas, 2007).

H2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

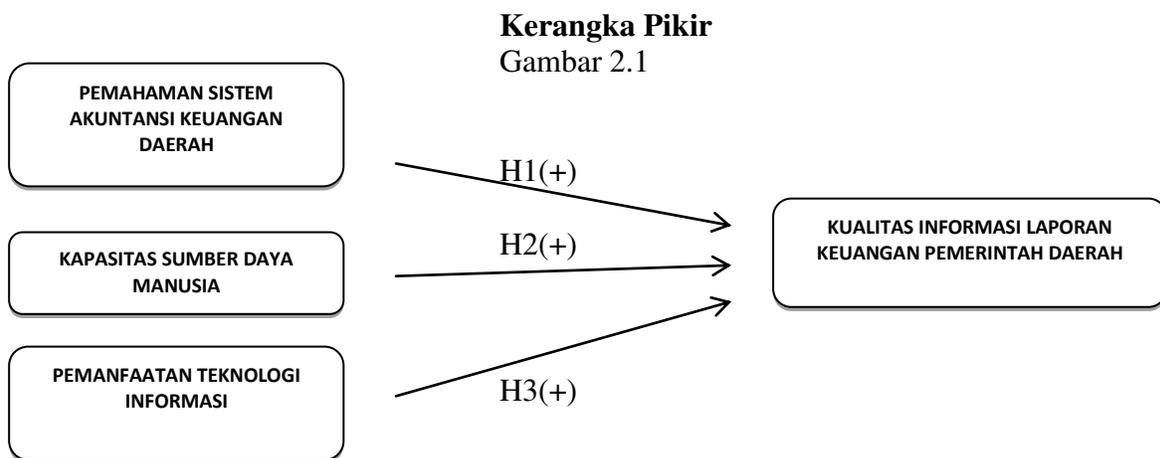
Hubungan Pemanfaatan Teknologi dengan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi Informasi (TI) merupakan sarana dalam menyebarkan berbagai informasi yang menyangkut dalam berbagai hal di antaranya dalam rangka penyebaran informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. (Indriasari, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta, yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Dinas-Dinas.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011 dalam Sari 2016) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada masing-masing Dinas.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta, yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Dinas-Dinas. Dari

populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode kuesioner. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian atau dipilih berdasarkan kriteria. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD yang berada di Wilayah Balaikota Daerah Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, sampel dipilih karena ada pada tempat dan waktu yang tepat. Peneliti akan memberikan kuesioner kepada setiap DKPD yang berada di lingkup Balaikota, Kota Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara *mean*, *nilai minimum*, *nilai maksimum* dan *standar deviasi*. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Hasil Tabel Statistik Deskriptif

		<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Devition</i>
Kualitas Informasi Laporan Pemerintah Daerah		63	24	39	30.89	3.111
Pemahaman Sistem Informasi Keuangan		63	18	38	27.10	4.703
Kapasitas Sumber Daya Manusia		63	11	27	20.70	3.762
Pemanfaatan Teknologi		63	21	35	27.19	2.639

Sumber: data diolah 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jumlah data (N) sebesar 63. Nilai minimum kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 24, nilai maksimum sebesar 29, rata-rata kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 30.89 dan standar deviasi sebesar 3.111. Hal ini sebagian responden menjawab setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Nilai minimum pemahaman informasi laporan keuangan sebesar 18, nilai maksimum 38, rata-rata pemahaman sistem informasi laporan keuangan sebesar 27.10 dan standar deviasi sebesar 4.703. Hal ini berarti sebagian responden menjawab setuju dalam hal pemahaman sistem informasi.

Nilai minimum kapasitas sumber daya manusia sebesar 11, nilai maksimum sebesar 27, rata-rata kapasitas sumber daya manusia sebesar 20.70 dan standar deviasi sebesar 3.762. Hal ini berarti sebagian responden menjawab setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia.

Nilai minimum pemanfaatan teknologi sebesar 21, nilai maksimum sebesar 35, rata-rata pemanfaatan teknologi sebesar 27.19 dan standar deviasi sebesar 2.639. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden setuju dalam hal pemanfaatan teknologi.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan statistic *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menghasilkan koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,494 dengan nilai signifikan (*Asym.s 2-taled*) sebesar 0,967. Hal tersebut menunjukkan bahwa signifikan lebih dari 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa secara statistik berarti variabel tidak berpengaruh secara signifikan statistik karena *p-value* lebih besar dari 0,05 berarti variabel tersebut bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Demikian pula dengan uji multikolinieritas menghasilkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas(Ghozali, 2011:105).

Hasil Regresi Linier Berganda

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F

Model	Sun Squares	Of Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	240.265	3	80.088	13.127	.000
Residual	359.957	59	6.101		
Total	600.222	62			

Sumber : data diolah, 2017

Hasil dari pengolahan F tabel adalah sebesar 2,76 yang dilihat pada daftar F tabel. Dalam hal ini menunjukkan bahwa F hitung sebesar 13.127 > F tabel sebesar 2,76 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,050 sehingga ketiga variabel independen yaitu pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika *Probabilitas sig.* < 0,05 dan t hitung > t tabel maka Ha diterima Ho menolak. Jika *Probabilitas sig.* > 0,05 dan t hitung < t tabel maka Ho diterima Ha menolak. Pada uji statistik uji t tabel didapatkan dengan rumus dimana $df=n-k-1= 63-4-1=58$, maka t tabel=1,67109. Berikut ini hasil uji stastistik t.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	10.322	3.382		3.052	.003
Pemahaman Sistem Akuntansi	.039	.098	.060	.403	.688
Kapasita Sumber Daya Manusia	-.024	.123	-.029	-.193	.847
Pemanfaatan Teknologi	.735	.126	.624	5.853	.000

a. *Dependen Variabel Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sumber : data diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 10.322 + 0,039X1 + (-0,024X2) + 0.735X3 + e$$

a. Hipotesis 1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.688 dan t hitung 0.403. berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 (0.688>0,05) dan t hitung<t tabel (0.403<1,67109). Hal ini menyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

b. Hipotesis 2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia(X2) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.847 dan t hitung -0.193. berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 (0.847>0,05) dan t hitung < t tabel (-0.193<1,67109). Hal ini menyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

c. Hipotesis 3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.000 dan t hitung 5.853. berarti tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.000>0,05) dan t hitung>t tabel (5.853>1,67109). Hal ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633	.400	.370	2.470

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,370 artinya besarnya pengaruh dari pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 37,0%. Sisanya sebesar 63,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

1. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Menambahkan variabel penelitian yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menambahkan populasi responden agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meneliti.
3. Lebih memperhatikan indikator-indikator yang akan di jadikan butir pernyataan dikarenakan dalam pengujian *pilotest* dalam penelitian ini satu indikator dihilangkan yaitu pendidikan terakhir di karenakan banyak butir pernyataan yang berhubungan dengan pendidikan terakhir yang tidak valid.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyantini, sujana dan darmawan. 2014. *Pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit judgement*. E-Jornal S1 ak universitas pendidikan ganessa, vol.2 no.1

Bappenas. 2007.

Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta; BPFE

Bastian, Indra. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

<http://www.bpk.go.id>.

Huang, *et al.* 1999 dalam Lillrank, Paul. 2003. “*The Quality of Information*”, *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No. 6 pp. 691-703.

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo . 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, Simposium Nasional Akuntansi XI. 23 - 24 Juli. Pontianak.

Indriasih, Dewi dan Poppy Sofia Koeswayo. 2014. *The Effect f Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting and Its Impact on the Performance Accountability in Local Government*. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol. 5 Issue I.

Kadir, A. dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Lillrank, Paul. 2003. “*The Quality of Information*”, *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No. 6 pp. 691-703.

Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah No. 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pradono, Basukianto. 2010, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Faktor Yang Mempengaruhi dan Implementasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah)*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2015, Hal. 188 – 200 Vol. 22, No. 2 ISSN: 1412-3126.

Roshanti, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Volume 2, No. 1.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang No.15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Wahyudi, Johan. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pengendalian Internal Akuntansi Sebagai Intervening*. Skripsi (tidak diterbitkan). IKIP Mataram.
- Wini, Winidyaningrum, Celviana & Rahmawati. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukomonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Winanti, Sri dan Nila Aprila. 2014. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan, Dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus.